



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan H. Abd. Malik Pattana Endeng – Rangas – Mamuju 91512

e-mail : birohukum@sulbarprov.go.id, website : www.birohukum.sulbarprov.go.id

**Indikator Kinerja Utama
Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat**

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Definisi dan Formula
SS.1	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Hukum	IK.1	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Hukum	<p>Sesuai tugas dan fungsi dalam hal pembentukan produk hukum, Biro Hukum melakukan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan baik itu produk hukum provinsi maupun fasilitasi dan evaluasi produk hukum kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Barat.</p> <p>Pengukuran kinerja Penataan Peraturan Perundang-undangan Provinsi dapat dihitung dari realisasi produk hukum pengaturan, penetapan, naskah hukum lainnya dibagi dengan target masing-masing dan dikali dengan 100 persen. Untuk produk hukum yang didokumentasi dan dikelola informasi produk hukumnya diperoleh dari jumlah produk hukum daerah dan naskah hukum lainnya yang didokumentasikan dibagi dengan target dan dikali dengan 100 persen.</p> <p>Untuk kinerja Penataan Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota dihitung dari jumlah fasilitasi dan evaluasi produk hukum kabupaten/kota yang difasilitasi dan dievaluasi dibagi dengan target yang telah ditetapkan dalam satu tahun dan dikali dengan 100 persen.</p>

				<p>Biro Hukum selain melakukan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan baik itu produk hukum provinsi maupun fasilitasi dan evaluasi produk hukum kabupaten/kota, Biro Hukum juga memfasilitasi bantuan hukum.</p> <p>Fasilitasi bantuan hukum dimaksud adalah penyelesaian perkara Litigasi, Non Litigasi serta pelaporan Aksi HAM di Provinsi Sulawesi Barat.</p> <p>Pengukuran kinerja dapat diukur dari Jumlah Penanganan Sengketa Litigasi, Penanganan Sengketa Non Litigasi dan pelaporan Aksi HAM yang diselesaikan dibagi dengan target masing-masing dan dikali 100 persen.</p>
SS.2	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	IK.1	Nilai SAKIP Biro Hukum	<p>Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>Pengukuran SAKIP oleh Inspektorat Daerah diukur meliputi 5 komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.</p> <p>Dari hasil evaluasi tersebut dibagi dengan target dan dikali dengan 100 persen</p>

		IK.2	Nilai RB Biro Hukum	<p>Reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance).</p> <p>Pengukuran Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Daerah meliputi 8 (delapan) area perubahan yaitu : 1.Area Manajemen Perubahan 2.Area Penataan Peraturan Perundang-undangan 3.Area Penataan dan Penguatan Organisasi 4.Area Penataan Tatalaksana 5.Area Penataan Sistem Manajemen SDM 6.Area Penguatan Pengawasan 7.Area Akuntabilitas Kinerja , dan 8.Area Kualitas Pelayanan Publik</p> <p>Dari hasil evaluasi tersebut dibagi dengan target dan dikali dengan 100 persen</p>
		IK.3	Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Biro Hukum	<p>Pengukuran kinerja tata kelola manajemen ASN diperoleh dari kesesuaian penempatan ASN dengan dokumen Peta Jabatan sesuai ANJAB dan ABK</p>
		IK.4	Nilai Indeks SPBE Biro Hukum	<p>Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang biasa disebut dengan e-government adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya.</p> <p>Pengukuran SPBE oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat meliputi 25 indikator. Nilai tersebut akan dibagi dengan target dan dikalikan dengan 100 persen.</p>

		IK.5	Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Biro Hukum	Pengukuran kinerja realisasi anggaran diperoleh dari realisasi anggaran dibagid dengan pagu dan dikali dengan 100 persen
--	--	------	--	--



Kepala Biro Hukum,

Suyuti Marzuki, S.Pi, MT, M.Sc

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19690820 199303 1 005